

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. 2015. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Kencana
- Alfian Rosadi. 2020. *Competency Based Human Resource Management: Manajemen Aparatur Sipil di Indonesia*. Depok: Guepedia
- Anna Yulianti. 2022. *Urgensi Digitalisasi Sistem Pendaftaran Tanah*. Bandung: Penerbit Alumni
- Asep N. Mulyana. 2019. *Deffered Prosecution Agreement*. Jakarta: PT. Grasindo
- Bachtiar. 2021. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish
- Badan Pertanahan Nasional. 1997. Himpunan Pidato Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan. Jakarta: Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Badan Pertanahan Nasional
- Diah Imaningrum Susanti. 2021. *Penafsiran Hukum: Teori dan Metode*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 7
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish
- Ernawati Warida. 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bmedia
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama
- Hambali Thalib. 2009. *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan: Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: Kencana
- Hufron dan Hadi Husodo Tjandra. 2022. *Konsep Pengaturan Kewenangan dan Pertanggungjawaban Wakil Presiden Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka
- Irfan Setiawan. 2020. *Kecamatan Di Wilayah Perbatasan Negara: Tinjauan Teoritik, Normatif, dan Imperatif*. Bandung: RTujuh Media Printing
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Ed. Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Cetakan Ke-2)*. Depok: Prenada Media Group
- Laksanto Utomo. 2020. *Buku Ajar Hukum Agraria dan Property*. Jakarta: Legal Era Indonesia
- Muhammad Erwin. 2013. *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum*. Cetakan Ke-III. Jakarta: Rajawali

- Muhammad Idris Patarai. 2020. *Kebijakan Publik Daerah: Posisi dan Dimensinya dalam Perspektif Desentralisasi Kebijakan*. Makassar: De La Macca
- Muhammad Ilham Arisaputra. 2015. *Reforma Agraria di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurul Qamar dan Farah Syah Reza. 2020. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Nurul Qamar. 2021. *Seni Hukum: The Arts of Law*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn)
- Nurus Zaman. 2020. *Politik Hukum Dalam Negara Kesatuan Upaya Menciptakan Harmonisasi Pembangunan*. Malang: Literasi Nusantara
- Oemar Moechtar. 2017. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press
- Padmaningrum. 2021. *Pengembangan Karier dan Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru
- Ridwan HR. 2018. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rudi Haposan Siahaan, dkk. 2022. *Hukum Kenotariatan Indonesia Jilid I*. Bandung: Media Sains Indonesia
- S.F. Marbun. 2012. *Hukum Administrasi Negara I*. Yogyakarta: FH UII Press
- Sahya Anggara. 2016. *Administrasi Kepegawaian Negara*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Solahudin Pugun. 2021. *Perihal Tanah dan Hukum Jual Belinya serta Tanggung Jawab PPAT terhadap Akta yang Mengandung Cacat Perspektif Negara Hukum*. Yogyakarta: Deepublish
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2019. *Hukum Kepegawaian di Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- Syamsir dan Nika Saputra. 2022. *Administrasi Kepegawaian*. Purbalingga: Eureka Media Aksara
- Tatiek Sri Djamiati. 2010. *Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti
- Vivit Rosmayanti, dkk. 2022. *Challenges of Social Sciences, Education, and Technology for Achieving Sustainable Development Goals (SDGS): Jilid I*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Wahyudi Kumorotomo. 2013. *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Willy D.S. Voll. 2013. *Negara Hukum dalam Keadaan Pengecualian*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 2018. *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainal Asikin. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group

Jurnal

A.M. Zulham Saputra Abrar Natsir, Zulkifli Aspan, dan Muh. Hasrul. 2021. "Sanksi Disiplin Bagi Aparatur Sipil Negara yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika". Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum. Universitas Swadaya Gunung Jati. Vol. 5 Nomor 1, Februari 2021

Alfandi. "Evaluasi Implementasi Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Camat Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2004 di Kecamatan Sukasari". Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Sumatera Barat. Vol. 1. Nomor 1 Juni 2021

Andi Suci Wahyuni. "Urgensi Kebutuhan Akta Autentik di Masa Pandemi Covid-19". Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Vol. 18 Nomor 1. Oktober 2020

Anshori Ilyas dan Hamzah. "Administrative Land Conflicts and Reforming State-Owned Enterprises in Indonesia". Hasanuddin Law Review. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Vol. 8 Nomor 2. Agustus 2022

Chalvin R. Ruitan, Michael Mantiri, dan Josef Kairupan. "Proses Mutasi Aparatur Sipil Negara dalam meningkatkan Kualitas Kerja: Studi di Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe". Jurnal Eksekutif. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Vol. 1. Nomor 1 Tahun 2018

Hendry Dwicahyo Wanda dan Rusdianto Sesung. "Prinsip Kehati-hatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Pengurusan Peralihan Tanah Letter C". Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam. Universitas Narotama Surabaya. Vol. 7. Nomor 2 Oktober 2017

Henny Juliani. 2020. "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang yang Menimbulkan Kerugian Negara". Administrative Law & Governance Journal. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Vol. 3 Nomor 1. Maret 2020

Ombi Romli. 2016. "Tanpa Incumbent. Keterlibatan Politik Aparatur Birokrasi Pada Pemilukada Serentak Menurun (Studi Perbandingan Pemilukaa Langsung Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 dengan Tahun 2015)". Jurnal CosmoGov. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Vol. 2 Nomor 1. April 2016

Selamat Lumban Gaol. "Kedudukan dan Kekuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Sistem Pembuktian Berdasarkan Hukum Tanah

Nasional". Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara. Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Mersekal Suryadarma. Vol. 10. Nomor 1. September 2019

Yokpedi Lette. "Optimalisasi Kelembagaan Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Malalayang Kota Manado". Jurnal Politico. Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi. Vol. 7 Nomor 1. Januari 2018

Internet:

Emir Yanwardhana. "Menteri ATR: Ada 8.000 Sengketa Tanah!". CNBC Indonesia". 24 Februari 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20220224160041-4-318095/menteri-atr-ada-8000-kasus-sengketa-tanah> (berita online). diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 10.54 WITA

Gloria Safira Taylor. "Diduga Mafia Tanah. Camat hingga Kepala Desa Ditangkap Polisi". CNN Indonesia. 05 September 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180905164047-12-327912/diduga-mafia-tanah-camat-hingga-kepala-desa-ditangkap-polisi> (berita online). diakses pada tanggal 16 April 2022 pukul 19.00 WITA

Ibnu Munsir. "Jelang Malam Tahun Baru. Walkot Makassar Lantik 467 Pejabat di Karebosi". detikNews. 31 Desember 2021. <https://news.detik.com/berita/d-5879131/jelang-malam-tahun-baru-walkot-makassar-lantik-467-pejabat-di-karebosi> (berita online). diakses pada tanggal 12 Februari 2022 pukul 20.00 WITA

Muh Ishak Agus. "Polda Sulsel Tangani 181 Kasus Mafia Tanah. Termasuk Lahan Masjid Al Markaz". detikSulsel. 30 Juni 2022. <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6154927/polda-sulsel-tangani-181-kasus-mafia-tanah-termasuk-lahan-masjid-al-markaz> (berita online). diakses pada tanggal 7 Juli 2022 pukul 18.00 WITA

Nirmala Maulana Achmad. "Ini Peran Eks Kades. Mantan Camat hingga Staff BPN dalam Lingkaran Mafia Tanah di Serang". Kompas.com. <https://megapolitan.kompas.com/> (berita online). diakses pada tanggal 17 April 2022 pukul 09.00 WITA

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. https://sulselprov.go.id/pages/info_lain/22 (website resmi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan). diakses pada tanggal 12 September 2022 pukul 21.22 WITA

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar. <https://sipp.pn-makassar.go.id/> diakses pada tanggal 30 Maret 2022 pukul 16.00 WITA

Wiwi. "Bantu Masyarakat Miliki Hak Tanah. BPN Kota Makassar Lantik 15 Camat Jadi PPATS". bukamata.news. 22 Oktober 2022. <https://bukamatanews.id/read/2021/10/22/bantu-masyarakat-miliki-hak-tanah->

[bpn-kota-makassar-lantik-15-camat-jadi-ppats](#) (berita online). diakses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 10.27 WITA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah sebagaimana yang telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Peraturan Menteri ATR/ Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1997 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana yang terakhir diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009

Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional

Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A. Kartini No 18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tel : (0411) 3024058 Fax (0411) 3634367
Website : <https://www.pn-makassar.go.id>, Email : info@pn-makassar.go.id,
Perdata : perdata@pn-makassar.go.id Pidana : pidana@pn-makassar.go.id
Hukum : hukum@pn-makassar.go.id, Tipikor : tipikor@pn-makassar.go.id
PHH : phh@pn-makassar.go.id, Niaga : niaga@pn-makassar.go.id
MAKASSAR90111

Makassar, 27 April 2022

SURAT KETERANGAN

Nomor : W22-UI/ **53** /PB.01/IV/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Sitti Fauziah Mutmainnah.**
No. Pokok : **B021181329**
Prog. Studi : **Hukum Administrasi Negara**
Alamat : **Makassar**
Judul : **Pertanggungjawaban Hukum Camat
Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
Sementara Setelah Dimutasi.**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 22 April 2022 sampai dengan 26 April 2022.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tanggal 07 April 2022 Nomor 1162/UN4.5.3/PT.00/2022.



WAKIL KETUA

Dr. MUHAMMAD SAINAL, SH.,M.Hum.
NIP. 19640401 199203 1 005

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Andi Pangerang Pettarani Nomor 8 Makassar Telp: (0411) 866622 email: kot-makassar@atrpn.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 873/SKet-73.71.UP.02.01/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : SITTI FAUZIYAH MUTMAINNAH
NIM : B021181329
Pekerjaan : MAHASISWA (S1)
Program Studi : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PADA FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR.

Telah mengadakan penelitian pada Instansi kami dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul penelitian "**Pertanggungjawaban Hukum Camat Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Setelah Mutasi Jabatan**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 09 Maret 2023

An. Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar
Kepala Subbagian Tata Usaha

Ditandatangani secara
elektronik

Aslinda Amsak, S.E., M.M.
NIP. 19750512 200804 2 001



Dokumen ini sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office ATR/BPN. Untuk memastikan keasliannya, silakan pindai Kode QR menggunakan fitur 'Validasi Surat' pada aplikasi Sentuh Tanahku

Melayani, Profesional, Terpercaya

v 1.04



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MAMAJANG

Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 10 Tlp. (0411) 830625 Makassar 90132



Makassar, 7 Maret 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor: 400 / ~~06~~ / KMJ / III / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ANDI AMRULLAH PALINRUNGI
Pangkat : Penata Muda Tk. I
NIP : 19771029 201501 1 001
Jabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat & Kesejahteraan Sosial

Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini:

Nama : SITTI FAUZIYAH MUTMAINNAH
NIM / JURUSAN : B021181329/ HUKUM Adm. NEGARA
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Jenis penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan KM. 10, Makassar
Judul penelitian : "PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM CAMAT
SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
SEMENTARA SETELAH MUTASI JABATAN"

Adalah benar yang telah melaksanakan *penelitian* di Kecamatan Mamajang mulai tanggal:
27 s/d 29 Juni 2022

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. CAMAT
Kasi Pemberdayaan Masyarakat &
Kesejahteraan Sosial



ANDI AMRULLAH PALINRUNGI, S.Pi
Pangkat Penata Muda Tk. I
NIP: 19771029 201501 1 001



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI**

JL. TEDUH BERSINAR No. 9 MAKASSAR ☎ 90211

SURAT KETERANGAN

NO. 800/272.a/KRC/VI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb
NIP : 19720710 199312 1 001
Pangkat/Gol : Pembina TK.I / IV.b
Jabatan : CAMAT RAPPOCINI


Menerangkan bahwa yang tersebut dibawah ini :

N a m a : SITI FAUZIYAH MUTMAINNAH
NIM/Jurusan : B021181329/HUKUM Adm.NEGARA
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNHAS
Jenis Penelitian : Skripsi
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan KM. 10 Makassar
Judul Penelitian : " PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM CAMAT SELAKU PEJABAT PEMBUAT
AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH MUTASI JABATAN"

Adalah benar yang telah melaksanakan penelitian di Kecamatan Rappocini mulai tanggal

27 s/d 29 Juni 2022

Demikin Surat Keterangan ini dibuat untuk diberikan kepada yang bersangkutan dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 28 Juni 2022
CAMAT RAPPOCINI

SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina
NIP. 19720710 199312 1 001



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN MARISO

Jalan Seroja No. 5 Telepon : 873728 Makassar

SURAT TELAH SELESAI MENELITI

Nomor : 23.1 /KMRS/070/VI/2022

**MENJELASKAN DENGAN INI
TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN /SURVEY DAN PENGUMPULAN DATA**

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : SITI FAUZIYAH MUTMAINNAH
NIM : B021181329
Jurusan : Hukum Adm. Negara
Instansi/ Pekerjaan : Mahasiswa (S1) Fak. Hukum UNHAS
Alamat : JL. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar
Judul : "PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM CAMAT SELAKU
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH SEMENTARA SETELAH
MUTASI JABATAN".
Di Wilayah : Kecamatan Mariso Kota Makassar
Waktu Penelitian : Tanggal 27 s/d 29 Juni 2022

Telah Selesai melakukan penelitian di Kecamatan Mariso.

Demikian Surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 28 Juni 2022



JULIAMAN, S.Sos

Pangkat/Gol : Pembina TK.I/IV b
Nip. 19720721 1997 03 1 006